

Peran Masyarakat Lokal dalam Keberhasilan Konservasi Hutan Berbasis Masyarakat: A Systematic Literature Review

John F Sahusilawane¹, Wilma Nancy Imlabla², Moda Talaohu³, Mersiana Sahureka⁴

¹ Universitas Pattimura dan john.sahusilawane@lecturer.unpatti.ac.id

² Universitas Pattimura dan imnona75@gmail.com

³ Universitas Pattimura dan talaohu.moda73@gmail.com

⁴ Universitas Pattimura dan mersisahu@gmail.com

ABSTRAK

Konservasi hutan berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Keberhasilan pendekatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan, kepastian hak kelola, kearifan lokal, distribusi manfaat, serta kemampuan mengatasi konflik sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat lokal dalam keberhasilan konservasi hutan berbasis masyarakat melalui Systematic Literature Review (SLR). Penelitian menggunakan pedoman PRISMA 2020 dengan penelusuran literatur pada Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan Garuda. Literatur diseleksi berdasarkan relevansi terhadap partisipasi masyarakat, kelembagaan dan tata kelola, dampak ekologis, serta sosial-ekonomi pengelolaan hutan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa partisipasi substantif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan memperkuat tanggung jawab masyarakat terhadap konservasi. Kelembagaan lokal yang kuat, kepastian hak kelola, legitimasi aturan, dan kolaborasi multipihak mendukung keberlanjutan pengelolaan. Manfaat ekonomi dan sosial juga dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekologis apabila pemanfaatan sumber daya dikendalikan secara berkelanjutan. Keberhasilan konservasi merupakan hasil interaksi antara faktor sosial, kelembagaan, ekonomi, dan ekologis.

Kata Kunci: *Konservasi Hutan, Masyarakat Lokal, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Lokal*

ABSTRACT

Community-based forest conservation positions local communities as important actors in maintaining forest ecosystem sustainability while addressing social and economic needs. The success of this approach is influenced not only by community involvement but also by institutional capacity, tenure security, local knowledge, benefit distribution, and the ability to address resource conflicts. This study aims to analyze the role of local communities in the success of community-based forest conservation through a Systematic Literature Review (SLR). The study follows the PRISMA 2020 guidelines and examines literature retrieved from Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, and Garuda. Articles were selected based on their relevance to community participation, institutions and governance, ecological outcomes, and the social and economic impacts of forest management. The synthesis indicates that substantive participation in planning, decision-making, implementation, and monitoring strengthens community responsibility for conservation. Strong local institutions, secure tenure rights, legitimate rules, and multi-stakeholder collaboration support the continuity of forest management. Social and economic benefits can also complement ecological protection when resource utilization is managed sustainably. Overall, successful community-based forest conservation results from interactions among social, institutional, economic, and ecological factors. These findings highlight the importance of strengthening community capacity and rights within forest governance.

Keywords: *Forest Conservation, Local Communities, Community-Based Forest Management, Community Participation, Local Institutions.*

PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat. Keberadaan

hutan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga menyediakan sumber penghidupan bagi komunitas yang bergantung pada sumber daya alam. Tekanan deforestasi dan degradasi hutan berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem, menurunkan kualitas lingkungan, serta melemahkan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan (Damiti et al., 2025; Ramadhan, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konservasi hutan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan ekologis dengan kebutuhan sosial masyarakat. Pengelolaan kawasan konservasi menghadapi persoalan hukum, kepentingan ekonomi, dan keterbatasan tata kelola sumber daya. Kadir et al. (2025) membahas problematika penguasaan kawasan konservasi yang berkaitan dengan pemanfaatan cagar alam untuk kegiatan ekonomi di Indonesia. Persoalan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan yang mampu menyeimbangkan perlindungan kawasan, kepastian hak, dan aktivitas masyarakat. Pendekatan konservasi yang mengabaikan dimensi sosial berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi legitimasi pengelolaan hutan.

Masyarakat lokal memiliki posisi strategis sebagai pengguna, penjaga, sekaligus pengelola sumber daya hutan. Pengetahuan ekologis, praktik tradisional, dan norma sosial dapat menjadi modal dalam membangun pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penelitian Sudirman et al. (2024) mengenai masyarakat adat Suku Kajang menunjukkan relevansi konservasi sosial dan biodiversitas terhadap kesehatan masyarakat adat. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan konservasi perlu dipahami melalui keterkaitan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan komunitas. Edukasi mengenai fungsi hutan serta ancaman kerusakannya turut berperan dalam membangun kesadaran konservasi masyarakat (Dewi et al., 2026). Konservasi hutan berbasis masyarakat diterapkan melalui beragam skema, termasuk *community-based forest management*, perhutanan sosial, hutan adat, dan pengelolaan hutan kolaboratif. Setiap skema memiliki karakteristik kelembagaan, mekanisme partisipasi, serta pola pembagian manfaat yang berbeda. Evaluasi implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Randublatung, Blora, memberikan gambaran mengenai keterlibatan komunitas dalam pengelolaan sumber daya hutan (Susilowati & Esariti, 2024).

Parera et al. (2024) juga mengkaji strategi pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat adat berbasis Soa di Negeri Hutumuri, Maluku, yang relevan dalam memahami peran kelembagaan lokal dan praktik pengelolaan berbasis komunitas. Keberhasilan konservasi hutan tidak dapat diukur hanya melalui perubahan tutupan hutan, tetapi juga mencakup biodiversitas, manfaat ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan dinamika konflik pengelolaan. Hapsari et al. (2025) menunjukkan keterkaitan antara perubahan sosial-ekonomi dan ekologi dalam pengelolaan subdaerah aliran sungai, sehingga memperkuat urgensi pendekatan multidimensional dalam memahami keberlanjutan lingkungan. Perbedaan karakteristik wilayah, skema pengelolaan, dan kapasitas masyarakat menunjukkan perlunya sintesis sistematis terhadap temuan penelitian terdahulu.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat lokal dalam keberhasilan konservasi hutan berbasis masyarakat melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Kajian ini menelaah bentuk partisipasi masyarakat, faktor kelembagaan dan sosial, dampak ekologis serta sosial-ekonomi, dan hambatan implementasi konservasi. Hasil kajian diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan partisipasi masyarakat dengan keberlanjutan konservasi hutan, sekaligus memberikan landasan bagi pengembangan tata kelola hutan berbasis masyarakat di Indonesia.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Konservasi Hutan Berbasis Masyarakat

Konservasi hutan berbasis masyarakat merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya hutan yang menempatkan komunitas lokal sebagai aktor penting dalam perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Pendekatan ini mengintegrasikan kepentingan ekologis dengan kebutuhan sosial melalui penguatan partisipasi, tanggung jawab kolektif, dan tata kelola lokal. Zamani et al. (2025) mengkaji konservasi hutan dan pesisir berbasis partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengelolaan yang menghubungkan keterlibatan komunitas dengan perlindungan lingkungan. Pengelolaan community-based forest conservation juga dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan melalui integrasi konservasi dan pemanfaatan potensi lokal (Hidayat & Wijayanto, 2026). Perspektif tersebut memperlihatkan pergeseran orientasi konservasi dari perlindungan ekologis semata menuju pendekatan yang mempertimbangkan manfaat sosial dan ekonomi.

B. Partisipasi dan Pengetahuan Lokal dalam pengelolaan Hutan

Partisipasi masyarakat dan pengetahuan lokal menjadi fondasi penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kearifan lokal mencakup nilai, norma, dan praktik ekologis yang berkembang melalui interaksi masyarakat dengan lingkungan. Nova et al. (2026) membahas strategi konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan komunitas dalam perlindungan sumber daya.

Praktik pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat adat juga menempatkan kearifan lokal sebagai elemen strategis dalam keberlanjutan pengelolaan (Sahsilawane, 2025). Pengelolaan sumber mata air oleh masyarakat Dusun Numbei memperlihatkan relevansi pengetahuan lokal dalam mendukung perlindungan sumber daya alam (Seran et al., 2022). Partisipasi yang bermakna mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan konservasi.

C. Kelembagaan Lokal, Hak Kelola, dan Konflik Sumber Daya Hutan

Kelembagaan lokal berperan dalam membentuk aturan, mengatur akses, serta mengoordinasikan pengelolaan sumber daya hutan. Peraturan desa dapat menjadi instrumen hukum untuk memperkuat tata kelola hutan desa dan mendukung agenda lingkungan berbasis masyarakat (Wattimena & Firmansyah, 2025). Implementasi kebijakan perhutanan sosial juga memperlihatkan pentingnya kerangka regulasi dalam mengatur pengelolaan sumber daya oleh komunitas (Hidayat & Rahman, 2025). Konflik antara perusahaan dan masyarakat menunjukkan bahwa ketidakselarasan kepentingan serta persoalan penguasaan sumber daya dapat memengaruhi keberlanjutan pengelolaan hutan (Hatalia et al., 2026). Kelembagaan yang legitimate, kepastian hak kelola, dan mekanisme penyelesaian konflik menjadi komponen penting dalam tata kelola konservasi.

D. Rasio Keuangan

Keberhasilan konservasi hutan berbasis masyarakat perlu dianalisis melalui indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara terpadu. Jemi (2026) menempatkan inovasi lokal dan pendekatan adaptif sebagai bagian penting dalam pengembangan strategi konservasi sumber daya hutan. Aspek ekologis dapat mencakup perlindungan tutupan hutan, biodiversitas, dan pengendalian degradasi, sedangkan aspek sosial-ekonomi meliputi partisipasi, manfaat mata pencaharian, serta kapasitas masyarakat.

Praktik pengelolaan Hutan Adat Bayan memperlihatkan relevansi aksiologi lingkungan dan kearifan lokal dalam memahami nilai serta orientasi keberlanjutan konservasi (Patmaraga & Sarjan, 2026). Zamani et al. (2025) turut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kerangka konservasi. Sintesis indikator tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi hubungan antara keterlibatan masyarakat dan keberhasilan pengelolaan hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis peran masyarakat lokal dalam keberhasilan konservasi hutan berbasis masyarakat. Proses kajian mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) guna memastikan tahapan identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur berlangsung secara sistematis dan transparan. Sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan temuan penelitian mengenai partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal, dampak ekologis dan sosial-ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat konservasi.

Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan Garuda dengan menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean: ("*community-based forest management*" OR "*community forest*" OR "*social forestry*" OR "*indigenous forest*") AND ("*forest conservation*" OR "*forest protection*" OR "*deforestation*") AND ("*local community*" OR "*local people*" OR "*indigenous*"). Literatur diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, tahun publikasi, ketersediaan teks lengkap, dan kesesuaian dengan tujuan kajian. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah yang membahas konservasi hutan berbasis masyarakat serta aspek ekologis, sosial, ekonomi, atau kelembagaan dalam pengelolaan hutan. Artikel duplikasi, editorial, opini, publikasi yang tidak relevan, dan literatur yang tidak memenuhi standar metodologis dikeluarkan dari kajian.

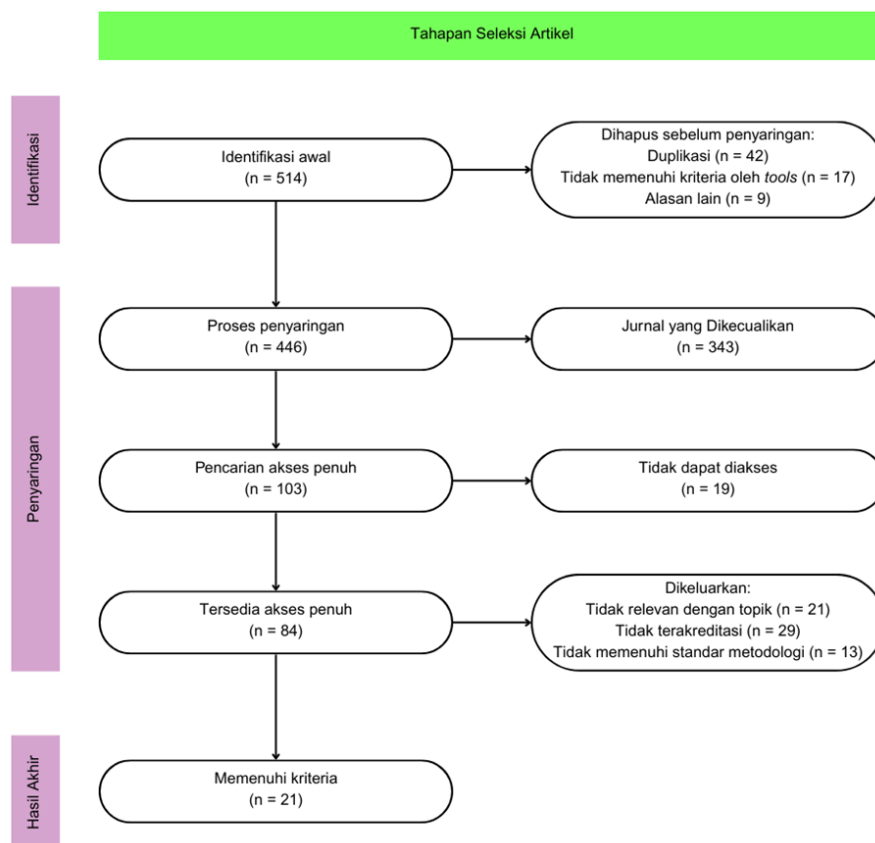
Proses seleksi mencakup identifikasi, penyaringan judul dan abstrak, pemeriksaan kelayakan teks lengkap, serta penetapan artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Tahapan tersebut didokumentasikan menggunakan diagram alir PRISMA 2020. Data yang diekstraksi meliputi penulis, tahun publikasi, lokasi penelitian, skema pengelolaan hutan, metode penelitian, bentuk partisipasi masyarakat, indikator konservasi, dan temuan utama. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat tema, yaitu partisipasi masyarakat, kelembagaan dan tata kelola, dampak ekologis serta sosial-ekonomi, dan faktor keberhasilan maupun hambatan konservasi. Perbandingan antarkajian digunakan untuk mengidentifikasi pola,

persamaan, dan perbedaan hasil penelitian dalam menjelaskan keterkaitan keterlibatan masyarakat lokal dengan keberlanjutan konservasi hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan identifikasi dan seleksi literatur dalam *Systematic Literature Review* mengenai peran masyarakat lokal dalam keberhasilan konservasi hutan berbasis masyarakat diawali melalui penelusuran pada berbagai basis data ilmiah yang menghasilkan 514 rekaman. Literatur yang ditemukan mencakup topik *community-based forest management*, *community forest*, *social forestry*, *indigenous forest*, *forest conservation*, *forest protection*, *deforestation*, *local community*, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Penyaringan awal mengeluarkan 68 rekaman, terdiri atas 42 artikel duplikat, 17 artikel yang tidak relevan, dan 9 rekaman yang dikeluarkan karena kendala teknis maupun administratif.

Sebanyak 446 artikel kemudian diperiksa berdasarkan judul dan abstrak. Tahap ini mengeluarkan 343 artikel karena tidak sesuai dengan fokus konservasi hutan berbasis masyarakat, tidak membahas peran masyarakat lokal, tidak relevan dengan aspek ekologis, sosial-ekonomi, atau kelembagaan, maupun tidak memenuhi konteks penelitian. Penilaian *full-text* dilakukan terhadap 103 artikel yang lolos penyaringan. Sebanyak 19 artikel tidak dapat digunakan karena keterbatasan akses teks lengkap dan kendala teknis lainnya, sehingga tersisa 84 artikel untuk evaluasi lebih lanjut. Pemeriksaan mendalam selanjutnya mengeliminasi 63 artikel, yang terdiri atas 21 artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, 29 artikel yang berasal dari sumber publikasi yang belum terindeks atau belum melalui proses *peer review*, serta 13 artikel yang tidak memenuhi persyaratan desain dan kualitas metodologis. Keseluruhan proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan seleksi akhir disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Seleksi Artikel

Berdasarkan 21 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, sebanyak 10 artikel ditetapkan sebagai literatur utama dan disajikan dalam Tabel 1. Pemilihan mempertimbangkan relevansi terhadap tujuan penelitian, khususnya dalam menjelaskan partisipasi masyarakat, kelembagaan dan tata kelola, hak kelola, dampak ekologis, serta manfaat sosial-ekonomi dari konservasi hutan berbasis masyarakat. Keragaman lokasi, skema pengelolaan, karakteristik masyarakat, pendekatan penelitian, dan indikator konservasi menjadi dasar sintesis untuk mengidentifikasi pola keberhasilan, hambatan, serta implikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Tabel 1. Karakteristik Artikel yang Dianalisis

No.	Penulis & Tahun	Lokasi/Objek Kajian	Skema/Pendekatan Pengelolaan	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Widyagraha et al. (2022)	Blimbingsari, Taman Nasional Bali Barat	Kesepakatan konservasi kolaboratif	Partisipasi masyarakat dalam konservasi	Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kesepakatan konservasi dan memperkuat keterlibatan komunitas dalam perlindungan kawasan.
2	Seran et al. (2022)	Dusun Numbei, Suaka Margasatwa Kateri, Malaka	Berbasis kearifan lokal	Kearifan lokal dan pengelolaan sumber mata air	Pengetahuan dan praktik lokal berperan dalam menjaga sumber daya alam melalui norma serta tindakan masyarakat yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan.
3	Ajjiah et al. (2022)	HKm Harapan Sentosa, KPHL Batutegi	Hutan Kemasyarakatan	Tingkat partisipasi masyarakat	Tingkat partisipasi menjadi indikator penting dalam menilai keterlibatan masyarakat pada pengelolaan hutan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan pengelola.
4	Al Haqiqi & Widyastuty (2023)	Ekosistem mangrove	Konservasi berbasis masyarakat	Pemahaman dan partisipasi masyarakat	Tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi mangrove berkaitan dengan partisipasi dalam upaya perlindungan ekosistem dan mitigasi abrasi.

5	Parera et al. (2024)	Negeri Hutumuri, Kota Ambon	Pengelolaan hutan adat berbasis Soa	Kelembagaan dan strategi pengelolaan	Struktur sosial masyarakat adat dan nilai lokal menjadi dasar dalam pengelolaan hutan lindung serta mendukung pengaturan pemanfaatan sumber daya.
6	Susilowati & Esariti (2007)	Randublatung, Blora	Community-Based Forest Management (CBFM)	Implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Implementasi PHBM menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan serta dukungan kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan.
7	Primadika & Widhanarto (2024)	Hutan Adat Ketemenggungan Tae, Sanggau	Perhutanan sosial/hutan adat	Dampak ekonomi pengelolaan hutan	Program pengelolaan berbasis masyarakat memberikan dampak terhadap aspek ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan sumber daya dan aktivitas kehidupan.
8	Bayau et al. (2024)	Wilayah perbatasan hutan negara	Pengelolaan hutan berbasis komunitas	Kesejahteraan petani dan konservasi	Kebijakan pengelolaan berbasis komunitas berkaitan dengan kesejahteraan petani sekaligus mendukung konservasi spesies endemik.
9	Hatalia et al. (2026)	Negeri Sepa, Maluku Tengah	Pengelolaan sumber daya hutan	Konflik masyarakat dan perusahaan	Konflik pengelolaan menunjukkan pentingnya kejelasan kepentingan, hak akses, komunikasi, dan mekanisme penyelesaian dalam tata kelola sumber daya hutan.
10	Paly et al. (2026)	Negeri Oma, Maluku Tengah	Hutan desa	Dampak sosial-ekonomi pengelolaan hutan	Pengelolaan hutan desa memberikan implikasi terhadap kondisi sosial-

ekonomi masyarakat
serta menunjukkan
keterkaitan
pengelolaan sumber
daya dengan
penghidupan lokal.

Sumber: Data Diolah 2026

A. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Hutan

Partisipasi masyarakat merupakan komponen fundamental dalam konservasi hutan berbasis masyarakat karena menentukan sejauh mana komunitas lokal terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya. Partisipasi tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran masyarakat dalam kegiatan konservasi, tetapi mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pengelolaan hutan. Studi mengenai pembentukan Hutan Desa Kalaodi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan kawasan berbasis komunitas (Syamsuddin, 2025). Pola tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki posisi sebagai aktor yang berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya, bukan sekadar penerima manfaat program.

Tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan variasi berdasarkan karakteristik kelembagaan dan bentuk pengelolaan hutan. Widyagraha et al. (2022) menunjukkan keterlibatan masyarakat Blimbingsari dalam pelaksanaan kesepakatan konservasi Taman Nasional Bali Barat. Keterlibatan tersebut menggambarkan adanya ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan komitmen konservasi pada tingkat lokal. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di kawasan Hutan Lindung Egon Ilmedo juga memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi menjadi aspek penting dalam menilai keterlibatan komunitas pada pengelolaan sumber daya hutan (Meyokh et al., 2026).

Partisipasi masyarakat dapat berlangsung pada tingkat yang berbeda, mulai dari keterlibatan dalam kegiatan teknis hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Ajjiah et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di HKm Harapan Sentosa KPHL Batutege menjadi indikator penting dalam memahami kapasitas komunitas menjalankan fungsi pengelolaan. Dimensi partisipasi tersebut mencakup kontribusi tenaga, keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan, serta hubungan masyarakat dengan struktur kelembagaan pengelola. Sinery dan Manusawai (2016) juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pelaksanaan program pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani.

Keterlibatan masyarakat memiliki makna lebih luas ketika didukung oleh pemahaman terhadap fungsi ekologis sumber daya. Kajian Al Haqiqi dan Widyastuty (2023) menunjukkan keterkaitan antara tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam keberadaan hutan mangrove sebagai upaya mitigasi abrasi. Pengetahuan mengenai manfaat lingkungan dapat memperkuat kemauan masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan ekosistem. Zamani et al. (2025) menempatkan partisipasi sebagai basis dalam konservasi hutan dan pesisir, yang menunjukkan pentingnya keterlibatan komunitas dalam menghubungkan kepentingan ekologis dengan aktivitas pengelolaan lokal.

Sintesis berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi. Kualitas partisipasi ditentukan oleh keberadaan ruang pengambilan keputusan, kapasitas masyarakat, akses terhadap sumber

daya, serta kontinuitas keterlibatan dalam pengawasan dan pengelolaan. Partisipasi yang bersifat substantif berpotensi memperkuat legitimasi pengelolaan dan membangun tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan hutan. Pola tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan konservasi pada pembahasan berikutnya.

B. Pengaruh Kelembagaan Lokal dan Tata Kelola terhadap Keberhasilan Konservasi

Keberhasilan konservasi hutan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan yang mengatur hubungan antara masyarakat, sumber daya hutan, pemerintah, dan aktor lainnya. Kelembagaan yang efektif menyediakan aturan yang jelas, pembagian peran, mekanisme pengawasan, serta prosedur penyelesaian persoalan sehingga aktivitas konservasi dapat berlangsung secara konsisten. Ma et al. (2025) menunjukkan bahwa tata kelola konservasi yang inklusif dalam pengelolaan lanskap hutan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan distribusi ruang pengambilan keputusan yang memadai.

Kapasitas kelembagaan lokal berperan dalam menghubungkan aturan formal dengan praktik pengelolaan di tingkat komunitas. Pasaribu dan Dewi (2025) memperlihatkan bahwa tata kelola kelembagaan dan aktivitas usaha berkaitan dengan efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja kelompok tani hutan dalam skema perhutanan sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan tidak berhenti pada pembentukan organisasi, tetapi perlu disertai kapasitas pengelolaan dan kemampuan menerjemahkan aturan menjadi tindakan kolektif. Norma sosial dan mekanisme komunitas juga dapat memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya.

Kepastian hak kelola menjadi unsur penting dalam membangun tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan hutan. Das et al. (2026) menempatkan *community stewardship* sebagai bagian dari tata kelola sumber daya yang mengintegrasikan kepentingan sosial, keamanan penghidupan, dan keberlanjutan ekologis. Kejelasan hak dan tanggung jawab dapat menciptakan insentif bagi masyarakat untuk mempertahankan kondisi sumber daya karena manfaat pengelolaan memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan ekosistem.

Relasi antara masyarakat dan pemerintah turut menentukan efektivitas tata kelola konservasi. Mayarni et al. (2023) menekankan pentingnya tata kelola terintegrasi dalam pengelolaan kawasan mangrove melalui koordinasi antarpemangku kepentingan. Model kolaboratif memungkinkan pengetahuan lokal, kewenangan pemerintah, dan kepentingan konservasi dipertemukan dalam proses pengelolaan. Castillo-Salazar et al. (2025) menunjukkan bahwa tata kelola konservasi dalam pengembangan ekowisata membutuhkan koordinasi kelembagaan agar kepentingan ekonomi tidak terlepas dari tujuan perlindungan lingkungan.

Konflik kepentingan dapat melemahkan keberlanjutan konservasi apabila tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang legitimate dan dapat diterima para pihak. Marshall (2026) menempatkan tata kelola berbasis komunitas sebagai mekanisme yang dapat memperkuat tanggung jawab kewargaan dan keberlanjutan sosial-ekologis. Damiti et al. (2025) menegaskan bahwa tekanan deforestasi dan kerusakan lingkungan membutuhkan pengelolaan yang mempertimbangkan keterkaitan aspek ekologis dan kelembagaan. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat bukan sekadar struktur administratif, melainkan sistem aturan, hak, koordinasi, pengawasan, dan resolusi konflik yang mampu menjaga konsistensi konservasi dalam jangka panjang.

C. Dampak Ekologis dan Sosial-Ekonomi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat menghasilkan dampak yang bersifat multidimensional karena keberhasilan konservasi tidak hanya tercermin dari kondisi ekologis, tetapi juga dari perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak ekologis dapat diamati melalui perlindungan tutupan hutan, pengendalian degradasi, pemeliharaan biodiversitas, dan keberlanjutan fungsi ekosistem. Kajian Damiti et al. (2025) menegaskan bahwa stabilitas ekosistem hutan berkaitan erat dengan kemampuan pengelolaan dalam menghadapi tekanan deforestasi dan kerusakan lingkungan.

Pengelolaan berbasis komunitas memiliki peluang untuk mempertemukan kepentingan konservasi dengan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Bayau et al. (2024) menunjukkan keterkaitan kebijakan pengelolaan hutan berbasis komunitas dengan kesejahteraan petani sekaligus upaya konservasi spesies endemik. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan sumber daya hutan dapat berjalan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika pemanfaatan dikendalikan melalui mekanisme pengelolaan yang sesuai. Pengalaman pengelolaan hutan pinus juga menunjukkan adanya keterkaitan antara perubahan kondisi ekologis dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan (Nugroho et al., 2004).

Dimensi sosial-ekonomi terlihat melalui perubahan pendapatan, mata pencaharian, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan rumah tangga mempertahankan penghidupan. Primadika dan Widhanarto (2024) mengidentifikasi dampak ekonomi program perhutanan sosial bagi masyarakat di sekitar Hutan Adat Ketemenggon-gan Tae. Manfaat ekonomi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya hutan dapat menjadi instrumen penguatan penghidupan masyarakat apabila dikelola dalam kerangka keberlanjutan. Yuliasih dan Sihalo (2018) juga menempatkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai bagian dari strategi nafkah rumah tangga desa sekitar hutan.

Konteks lokal turut menentukan distribusi manfaat pengelolaan. Paly et al. (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan hutan desa memiliki implikasi terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Negeri Oma, Maluku Tengah. Toha et al. (2023) memperlihatkan bahwa perhutanan sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus tujuan kelestarian hutan di Kota Tarakan. Febrian et al. (2024) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya kehutanan perlu ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan ekonomi agar manfaat pemanfaatan sumber daya tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis.

Sintesis lintas studi menunjukkan bahwa konservasi dan kesejahteraan masyarakat bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan. Keterpaduan keduanya bergantung pada pola pemanfaatan sumber daya, distribusi manfaat, kapasitas pengelolaan, serta kemampuan kelembagaan menjaga batas ekologis. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat memberikan hasil konservasi yang lebih berkelanjutan ketika manfaat sosial-ekonomi menjadi bagian integral dari strategi perlindungan hutan, bukan sekadar konsekuensi tambahan dari program konservasi.

D. Faktor Keberhasilan, Hambatan, dan Implikasi bagi Konservasi Hutan di Indonesia

K Sintesis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi hutan berbasis masyarakat dipengaruhi oleh keterkaitan antara partisipasi, kelembagaan, manfaat ekonomi, dan kondisi ekologis. Partisipasi yang memberikan ruang nyata dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memperkuat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan hutan (Syamsuddin, 2025). Kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting karena menentukan

kemampuan komunitas menjalankan aturan, mengelola sumber daya, dan mempertahankan tindakan kolektif (Pasaribu & Dewi, 2025).

Kepastian hak kelola dan legitimasi aturan turut memengaruhi keberlanjutan pengelolaan. Tata kelola yang inklusif memungkinkan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya ditempatkan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih terkoordinasi (Ma et al., 2025). Praktik berbasis kearifan lokal juga dapat memperkuat legitimasi pengelolaan karena aturan konservasi memiliki keterkaitan dengan norma dan pengalaman masyarakat setempat (Nova et al., 2026).

Hambatan utama muncul ketika terdapat ketimpangan akses, keterbatasan kapasitas kelembagaan, konflik kepentingan, serta distribusi manfaat yang tidak proporsional. Konflik pengelolaan dapat mengurangi efektivitas konservasi apabila tidak disertai mekanisme penyelesaian yang legitimate dan dapat diterima para pihak. Pengelolaan yang mengabaikan tekanan sosial-ekonomi juga berpotensi meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya secara tidak berkelanjutan (Damiti et al., 2025).

Konteks Indonesia menunjukkan perlunya model konservasi yang mengintegrasikan partisipasi substantif, kepastian hak, penguatan kelembagaan, dan manfaat ekonomi yang adil. Pengelolaan hutan desa dan perhutanan sosial memperlihatkan bahwa manfaat sosial-ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi mempertahankan keberlanjutan hutan (Paly et al., 2026; Toha et al., 2023). Model konseptual hasil sintesis dapat dirumuskan sebagai partisipasi masyarakat → kelembagaan dan hak kelola → distribusi manfaat → hasil ekologis → keberlanjutan konservasi. Hubungan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan konservasi merupakan hasil interaksi faktor sosial, kelembagaan, ekonomi, dan ekologis secara simultan.

KESIMPULAN

Hasil Systematic Literature Review menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki posisi strategis dalam keberhasilan konservasi hutan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan teknis, tetapi mencakup perencanaan, pengawasan, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan keputusan. Partisipasi yang bersifat substantif memberikan ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi arah pengelolaan dan memperkuat tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan hutan. Keberhasilan konservasi juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan lokal, kepastian hak kelola, legitimasi aturan, koordinasi dengan pemerintah, serta kemampuan menyelesaikan konflik. Kelembagaan yang kuat dapat membangun aturan dan mekanisme pengawasan yang mendukung konsistensi pengelolaan. Kearifan lokal dan norma sosial menjadi modal penting dalam memperkuat kepatuhan serta legitimasi praktik konservasi.

Dampak pengelolaan berbasis masyarakat menunjukkan keterkaitan antara hasil ekologis dan sosial-ekonomi. Perlindungan hutan, pengendalian degradasi, dan pemeliharaan biodiversitas dapat berjalan bersama dengan peningkatan akses sumber daya, penguatan mata pencaharian, dan manfaat ekonomi masyarakat. Hambatan berupa keterbatasan kapasitas, ketimpangan manfaat, konflik kepentingan, dan lemahnya kepastian hak tetap menjadi tantangan dalam implementasi. Sintesis penelitian

merumuskan hubungan partisipasi masyarakat → kelembagaan dan hak kelola → manfaat sosial-ekonomi → hasil ekologis → keberlanjutan konservasi. Konservasi hutan di Indonesia perlu menempatkan masyarakat sebagai aktor tata kelola melalui penguatan kapasitas, kepastian hak, kelembagaan lokal, kolaborasi multipihak, serta distribusi manfaat yang berkeadilan

REFERENSI

- Ajijah, L. N., Safe'i, R., & Yuwono, S. B. (2022). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di HKm Harapan Sentosa KPHL Batutegei. *Ulin: Jurnal Hutan Tropis*, 6(2), 114–120. <https://doi.org/10.32522/ujht.v6i2.8073>
- Al Haqiqi, F. U., & Widyastuty, A. A. S. A. (2023). Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove sebagai upaya mitigasi bencana abrasi. *Jurnal WAKTU*, 21(1), 43–51. <https://doi.org/10.36456/waktu.v21i01.792>
- Bayau, E., Suhry, H. C., Senen, M. A., & Soselisa, F. (2024). Pengaruh kebijakan kelola hutan berbasis komunitas terhadap kesejahteraan petani dan konservasi spesies endemik di wilayah perbatasan hutan negara. *Tumbuhan: Publikasi Ilmu Sosiologi Pertanian dan Ilmu Kehutanan*, 1(1), 25–45. <https://doi.org/10.62951/tumbuhan.v1i1.565>
- Castillo-Salazar, I. P., Sanagustín-Fons, V., & Pardo, I. L. (2025). Ecotourism as a catalyst for sustainable development: Conservation governance in mountain regions. *Societies*, 15(7), 196. <https://doi.org/10.3390/soc15070196>
- Damiti, R. A., Pakaya, P., Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Utina, R. (2025). Stabilitas ekosistem hutan Indonesia dalam menghadapi deforestasi dan kerusakan lingkungan: Tinjauan literatur. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis*, 2(2), 176–188. <https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.343>
- Das, A., Mishra, S., & Bauri, K. P. (2026). Regenerative resource governance for sustainable social development: Integrating safety, circularity, and community stewardship with insights from the Chilika Lagoon system. *GRN Tech Research and Sustainability*, 6, 10. <https://doi.org/10.1007/s44173-026-00036-w>
- Dewi, B. S., Kaskoyo, H., Hidayat, W., Suri, I. F., Tsani, M. K., Cristi, E., & Alsadela, W. O. (2026). Penguatan nilai-nilai cinta alam melalui edukasi dan sosialisasi fungsi hutan serta ancaman kerusakannya bagi siswa SDN 2 Kemiling Permai Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 5(1), 70–80. <https://doi.org/10.23960/jpfp.v5i1.11927>
- Hapsari, Y. D., Reftantia, G., Kurniawan, D. A., Masyitoh, M., & Rahmawati, T. (2025). Perubahan sosial ekonomi dan ekologi dalam upaya pengelolaan sub daerah aliran sungai Pusur di Kabupaten Klaten. *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)*, 4(2), 282–293. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.6104>
- Hartono, T., Trisakti, F. A., & Fuadiah, I. (2022). Community-based ecotourism: Peran 'Pokdarwis' dalam branding Siak Hijau. *PROfesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.26018>
- Hatalia, S. J., Silaya, T. M., & Imlabla, W. N. (2026). Kajian konflik pengelolaan sumber daya hutan antara PT. Bintang Lima Makmur dan masyarakat Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. *MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi*, 3(1), 89–100. <https://doi.org/10.69840/marsegu/3.1.2026.89-100>
- Hidayat, R. A. A., & Rahman, A. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang perhutanan sosial di Desa Talonang Baru (Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(2). <https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum>
- Hidayat, R. P., & Wijayanto, P. A. (2026). Analisis pengelolaan community-based forest conservation sebagai upaya pengembangan ekowisata berkelanjutan: Studi kasus Taman Wisata Alam Guci, Kabupaten Tegal. *Ulin: Jurnal Hutan Tropis*, 10(1). <https://doi.org/10.32522/ujht.v10i1.25204>
- Jemi, R. (2026). *Konservasi sumber daya hutan, inovasi lokal dan pendekatan adaptif dalam konservasi hutan*. BriMeTa Publisher.
- Kadir, M. I., Dungga, W. A., & Mustika, W. (2025). Problematika hukum dalam penguasaan kawasan konservasi: Studi atas pemanfaatan cagar alam untuk kegiatan ekonomi di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2507>

- Ma, T., Wang, P., Yang, D., & Wang, Z. (2025). Towards inclusive conservation governance in forest landscape co-management: Insights from the Yarlung Tsangpo river basin. *Trees, Forests and People*, 19, 100762. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100762>
- Marshall, G. R. (2026). Re-enchanting the commons through community-based governance to grow civic virtue for social-ecological sustainability. *International Journal of the Commons*, 20(1), 347–363. <https://doi.org/10.5334/ijc.1752>
- Mayarni, Syahza, A., Siregar, S. H., Khoiri, M. A., Nasution, M. S., Sulistyani, A., & Hariyani, E. (2023). *Tata kelola kawasan mangrove terintegrasi dalam perspektif governance di Indonesia*. SIP Publishing.
- Meyokh, D. E., Marimpan, L. S., Rammang, N., & Purnama, M. M. E. (2026). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo, Desa Wairterang, Kabupaten Sikka. *Journal of Innovative and Creativity (JOECY)*, 6(2), 31425–31432. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.5638>
- Nova, L. S., Rumanta, M., & Kunda, R. M. (2026). Strategi konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal: Studi kasus Desa Kersik Tuo, Kerinci. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 5(2), 69–77. <https://doi.org/10.35912/jnm.v5i2.6402>
- Nugroho, N., Priyono, C. N. S., & Cahyono, S. A. (2004, August). Dampak sosial, ekonomi dan ekologi pengelolaan hutan pinus. *Ekspose Hasil Litbang Teknologi Pengelolaan DAS untuk Mendukung Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air*, Kebumen, Jawa Tengah.
- Paly, A. M., Parera, E., & Iskar, I. (2026). Dampak pengelolaan hutan desa terhadap sosial ekonomi masyarakat Negeri Oma, Maluku Tengah. *MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2(12), 887–903. <https://doi.org/10.69840/marsegu/2.12.2026.887-903>
- Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B., & Sumardi. (2024). Strategi pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat adat berbasis Soa (Kasus: Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Provinsi Maluku). *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*, 271–288.
- Pasaribu, L. M., & Dewi, N. L. P. K. (2025). Pengaruh tata kelola kelembagaan dan usaha terhadap efektivitas pengelolaan hutan melalui kinerja KTH di perhutanan sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali. *Journal Science Innovation and Technology (SINTECH)*, 5(2). <https://doi.org/10.47701/t13waj86>
- Patmaraga, B., & Sarjan, M. (2026). Aksiologi lingkungan dan kearifan lokal dalam praktik pengelolaan Hutan Adat Bayan, Lombok Utara. *Journal of Multidisciplinary Science and Natural Resource Management*, 2(1).
- Primadika, Y., & Widhanarto, G. O. (2024). Dampak ekonomi program perhutanan sosial bagi masyarakat di sekitar hutan adat Ketemenggungan Tae Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 3(4).
- Ramadhan, L. P. (2025). Analisis deforestasi dan degradasi terhadap lingkungan hidup. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 3(1), 91–109.
- Sahsilawane, J. F. (2025). Sustainable forest management strategy based on the local wisdom of indigenous communities [Strategi pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan lokal masyarakat adat]. *Science and Applied Journal (SIAP)*, 2(4), 183–198. <https://doi.org/10.62207>
- Seran, M. A. T., Rammang, N., Kaho, N. P. L. B. R., & Purnama, M. M. E. (2022). Peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber mata air di Suaka Margasatwa Kateri oleh masyarakat Dusun Numbei, Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 10(2). <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2>
- Sinery, A. S., & Manusawai, J. (2016). Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(3). <https://doi.org/10.22146/jml.18811>
- Sudirman, I., Kamaruddin, S. A., Adam, A., & Ihsan, A. (2024). Pengaruh konservasi sosial dan biodiversitas terhadap kesehatan masyarakat adat Suku Kajang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.4573>
- Susilowati, I., & Esariti, L. (2007). Evaluation on community based forest management implementation in Randublatung, Blora. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 3(2), 25–32. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v3i2.25-32>
- Syamsuddin, W. D. (2025). Partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Hutan Desa Kalaodi Kota Tidore Kepulauan. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 130–143. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v9i1.2313>
- Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. (2023). Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 133. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302>

- Wattimena, A. K., & Firmansyah, A. E. (2025). Pendampingan pengelolaan hutan desa dalam upaya mendukung kebijakan desa ProKlim melalui pembentukan instrumen hukum peraturan desa di Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(6), 1755. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1030>
- Widyagraha, N. G. B., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2022). Partisipasi masyarakat Blimbingsari dalam pelaksanaan kesepakatan konservasi Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 287–293. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4813.287-293>
- Yuliasih, & Sihalo, M. (2018). Peran pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dengan strategi nafkah rumah tangga desa sekitar hutan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(6), 717–730. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.6.717-730>
- Zamani, I. S., Arum, N. A., & Hasibuan, D. K. A. (2025). Konservasi hutan dan pesisir berbasis partisipasi masyarakat (Studi kasus: KPH Banawa Lalundu). *Jurnal Kehutanan Indonesia (JKIC)*, 6(1).